



BUKU PANDUAN MODULE SISTEM INFORMASI DISIPLIN (SIADIS)

PROJECT LEADER

DEWI MEIKA SAFITRI, SH

KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN
APARATUR DAN KEDUDUKAN HUKUM

PROJECT TITLE

PENGELOLAAN DATA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN MELALUI SISTEM
INFORMASI DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (SIADIS)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

DASAR HUKUM

Dasar Hukum sebagai acuan dalam pembuatan module sistem informasi disiplin:

1. UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ketentuan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

DESKRIPSI

Sistem Informasi Disiplin (Siadis) PNS pada Sub Bidang Pembinaan Aparatur dan Kedudukan Hukum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan merupakan sistem pengelolaan data penjatuhan hukuman disiplin pegawai berbasis aplikasi yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian data secara akurat, cepat dan akuntabel mengenai data penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat mengetahui tingkat kedisiplinan dan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan serta sebagai preseden bagi pimpinan dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Aplikasi ini menjadi salah satu fitur pada aplikasi SILKA di BKPPD Kabupaten Balangan.

LATAR BELAKANG (BURNING PLATFORM)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur daerah. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian diantaranya dalam hal pembinaan aparatur dan kedudukan hukum pegawai. Dengan adanya upaya peningkatan pembinaan aparatur diharapkan pelanggaran disiplin dapat diminimalisir dan penanganan kasus-kasus.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian diantaranya dalam hal pembinaan aparatur dan kedudukan hukum pegawai. Dengan adanya upaya peningkatan pembinaan aparatur diharapkan pelanggaran disiplin dapat diminimalisir dan penanganan kasus-kasus disiplin dapat ditangani dengan cepat. Mengingat masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan diantaranya pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika, penyalahgunaan wewenang terhadap jabatan, melakukan perkawinan tanpa izin atasan dan isteri pertama serta pelanggaran disiplin lainnya, terhadap pelanggaran tersebut pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Penjatuhan hukuman disiplin bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Juga dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam rangka tertib administrasi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 47 menyebutkan pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya. Dokumen keputusan penjatuhan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pada saat ini pendokumentasian data penjatuhan hukuman disiplin dilakukan secara manual yaitu menyimpan fisik arsip berupa kertas. Hal ini menjadi kendala karena berakibat tidak terkelolanya arsip data penjatuhan hukuman disiplin dengan baik dan sulitnya mendapatkan kembali pada saat diperlukan (SKPD yang tidak menyampaikan data penjatuhan hukuman disiplin kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah). Selain itu, dalam hal pelanggaran disiplin berupa ketentuan jam kerja khususnya yang masih dalam kewenangan SKPD (Pelanggaran Disiplin Tingkat Ringan) masih ada SKPD yang tidak melaksanakan pendokumentasian / penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Terkait pengolahan data dan penyajian informasi kepegawaian, saat ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan menggunakan aplikasi komputer yaitu SILKA Online (Sistem Informasi dan Layanan Kepegawaian Online). Namun dalam layanan aplikasi tersebut tidak terdapat menu data disiplin pegawai.

03

Berkaitan dengan hal tersebut, ditemukan beberapa area kegiatan yang bermasalah menurut isu permasalahannya, yaitu :

- a. Belum optimalnya pengelolaan data Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan.
- b. Kurangnya pemahaman Pejabat Struktural dan Fungsional dalam penjatuhan hukuman disiplin.
- c. Belum optimalnya rekapitulasi absensi kehadiran Pegawai Negeri Sipil.
- d. Belum ada regulasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kode Etik Pegawai.
- e. Belum optimalnya kegiatan pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan purna tugas.

Berdasarkan permasalahan diatas, sehingga diperlukan proyek perubahan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Data Disiplin Pegawai dengan melaksanakan Pengelolaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Melalui Sistem Informasi Disiplin (Siadis) Pegawai Negeri Sipil Pada Sub Bidang Pembinaan Aparatur Dan Kedudukan Hukum Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.

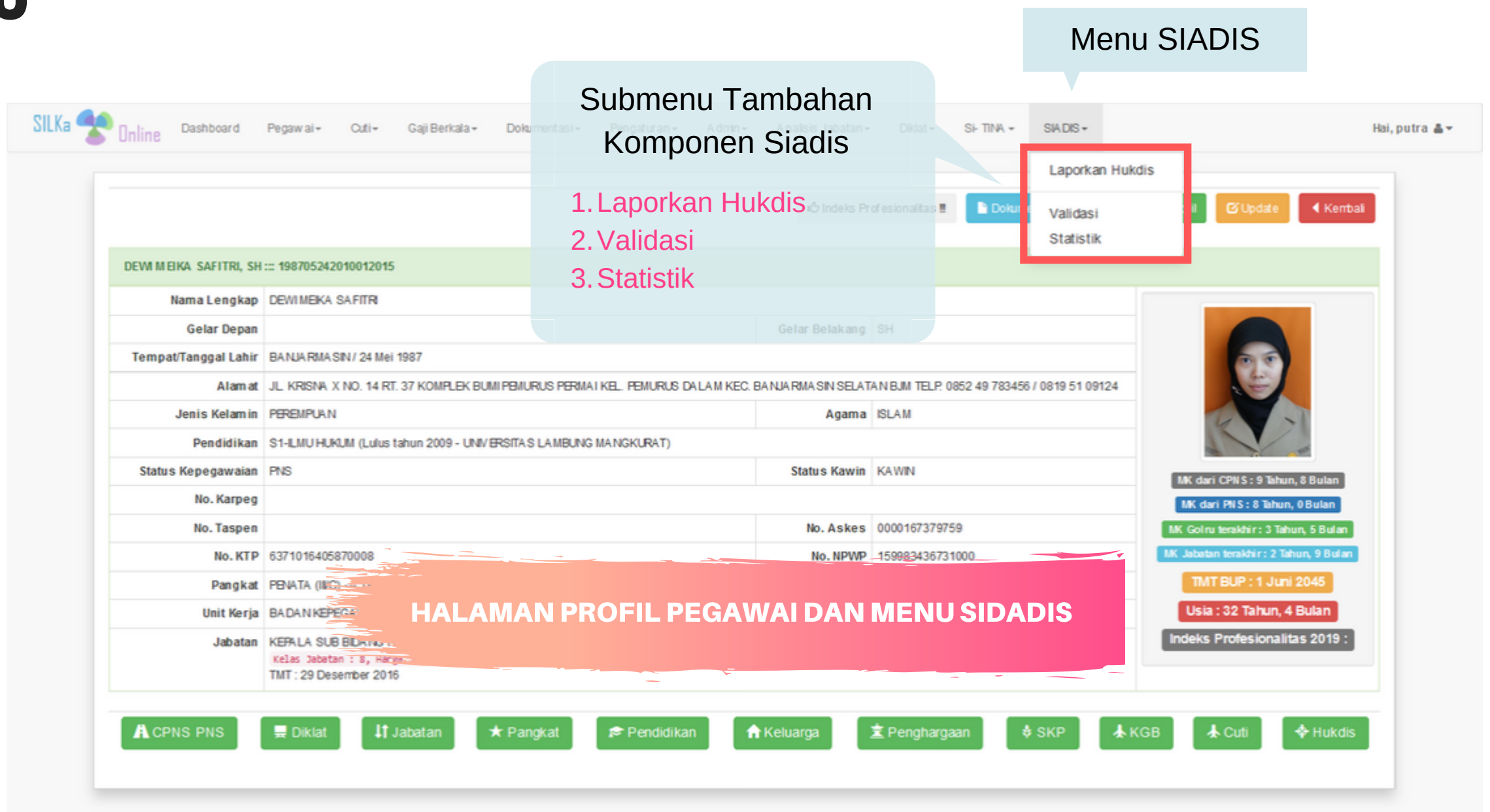
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIAKSI



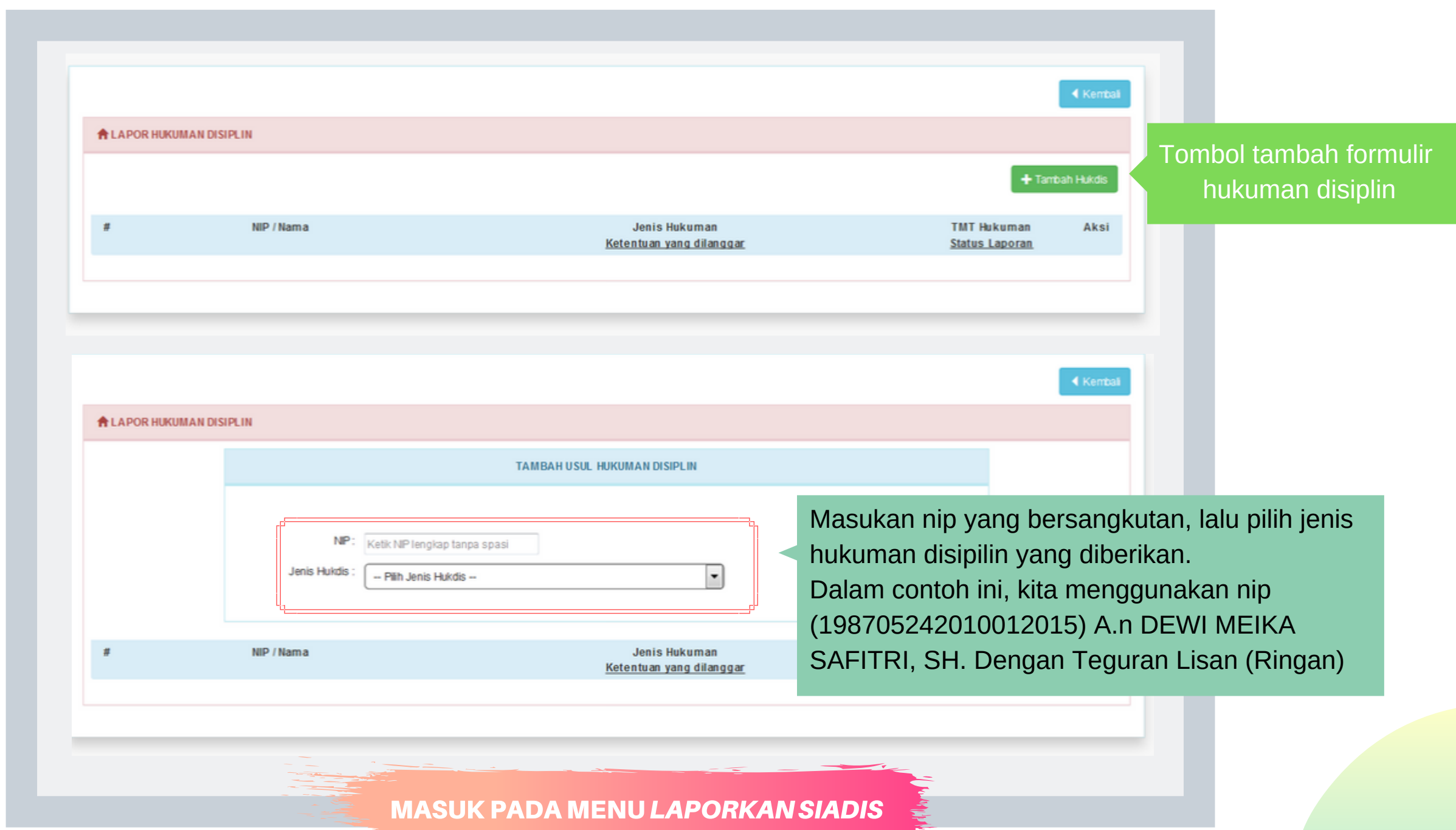
Pertama masukan link / url alamat Aplikasi silka Online (<http://silka.bkppd-balangankab.info>), maka akan di arahkan pada halaman login. Kemudian Masukan Username dan Password yang telah terdaftar pada aplikasi, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan sebagai Pengelola Kepegawaian pada SKPD atau Unit Kerja.



Setelah login berhasil, user akan di alihkan ke halaman utama aplikas Silka



User masuk pada fitur silka. Terdapat Menu baru (New) Proyek Perubahan SIADIS dengan beberapa Sub Menu Tambahkan sebagai komponen dari Module Siadis.




TAMBAH USUL HUKUMAN DISIPLIN

[← Batal](#)

NIP :

Jenis Hukdis :



DEWI MEIKA SAFITRI, SH
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN APARATUR DAN KEDUDUKAN HUKUM
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kasus Ketidakhadiran : Pilih YA, jika kasus yang dilaporkan berkaitan dengan KETIDAKHADIRAN

Panggilan I :

No. Surat :

Tgl. Surat : dd-mm-yyyy

Tgl. Pemeriksaan I : dd-mm-yyyy

Panggilan II :

No. Surat :

Tgl. Surat : dd-mm-yyyy

Tgl. Pemeriksaan II : dd-mm-yyyy

TMT Hukuman : dd-mm-yyyy

Deskripsi Kesalahan :

Peraturan terkait :

Pejabat YBW :

No. SK :

Tgl. SK : dd-mm-yyyy

[Simpan](#)

FORM LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN

Setelah Nama / Nip yang bersangkutan ditemukan, pelapor wajib mengisi seluruh formulir yang tersedia, sesuai dengan jenis hukuman yang diberikan

VALIDASI USUL HUKUMAN DISIPLIN
Kembali

Sukses, Laporan Hukuman Disiplin DEWI MEIKA SAFITRI, SH telah disetujui, dan telah ditambahkan ke riwayat Hukuman Disiplin

Pilih Tahun TMT Hukuman Disiplin

Cetak Nominatif Tahun 2019

#	NIP / Nama	Jabatan / Unit Kerja pada saat Hukdis	Jenis Hukuman <i>Ketentuan yang dilanggar</i>	TMT Hukuman <i>Status Laporan</i>	Aksi
1	NIP. 198705242010012015 DEWI MEIKA SAFITRI, SH	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN APARATUR DAN KEDUDUKAN HUKUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	TEGURAN LISAN PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS	30 April 2019	Setuju Validasi

↑
↓

DETAIL HUKUMAN DISIPLIN
Kembali

IDENTITAS PNS Pada saat dijatuhi Hukuman Disiplin

NIP : 198705242010012015

NAMA : DEWI MEIKA SAFITRI, SH

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN APARATUR DAN KEDUDUKAN HUKUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
TMT Jabatan : 29 Desember 2016

Pangkat (Golru) : PENATA (IIIC)
TMT Pangkat (Golru) : 01 April 2016

Gaji : Rp. 3.021.300
TMT Gaji : 01 April 2016

DETAIL Hukuman Disiplin

Jenis Hukuman : TEGURAN LISAN
TINGKAT: RINGAN

Panggilan Pertama : No. Surat Penggilan. 800/453/bkppd-blg/2019 (Tanggal 05 April 2019)
Pemeriksaan Pertama pada tanggal 07 April 2019

Panggilan Kedua : Panggilan Kedua tidak dilakukan
Pemeriksaan Kedua tidak dilakukan

Peraturan yang dilanggar : PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS

Masa Hukuman : Terhitung mulai. 30 April 2019

Lama Hukuman : 0 Tahun, 0 Bulan

Deskripsi Kasus : PELANGGARAN KETIDAKHADIRAN

Surat Keputusan : Pejabat berwenang. SUFRIANNOR, S.Sos, MAP (KEPALA)
Nomor. 826/512/bkppd-blg
Tanggal. 30 April 2019

Status Laporan SETUJU

Dilaporkan oleh DEWI MEIKA SAFITRI, SH pada tanggal 2019-09-17 09:46:20
Divalidasi oleh FITHRIA CIPTA WULANDARI, A.Md pada tanggal 2019-09-19 07:29:34

Validasi

VALIDASI BKPPD

Setelah semua data yang dilaporkan telah dikirim, selanjutnya tugas verifikasi pada Badan Kepegawaian agar mengecek apakah data tersebut benar, setelah dinyatakan sesuai makai BKPPD akan memvalidasi laporan tersebut dan otomatis sistem akan menyimpan laporan tersebut pada data riwayat hukuman disiplin yang bersangkutan.

DEWI MEIKA SAFITRI, SH :: 198705242010012015

Nama Lengkap	DEWI MEIKA SAFITRI		
Gelar Depan		Gelar Belakang	SH
Tempat/Tanggal Lahir	BANJAR MASIN / 24 Mei 1987		
Alamat	JL. KRISNA X NO. 14 RT. 37 KOMPLEK BUMI PEMURUS PERMAI KEL. PEMURUS DALAM KEC. BANJAR MASIN SELATAN BUMI TELP. 0852 49 783456 / 0819 51 09124		
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Agama	ISLAM
Pendidikan	S1-ILMU HUKUM (Lulus tahun 2009 - UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT)		
Status Kepegawaian	PNS	Status Kawin	KAWIN
No. Karpeg			
No. Taspens		No. Askes	0000167379759
No. KTP	6371016405870008	No. NPWP	159983436731000
Pangkat	PEBATA (IIC) --- TMT : 01 April 2016		
Unit Kerja	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		
Jabatan	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN AFRATUR DAN KEDUDUKAN HUKUM TMT : 29 Desember 2016		

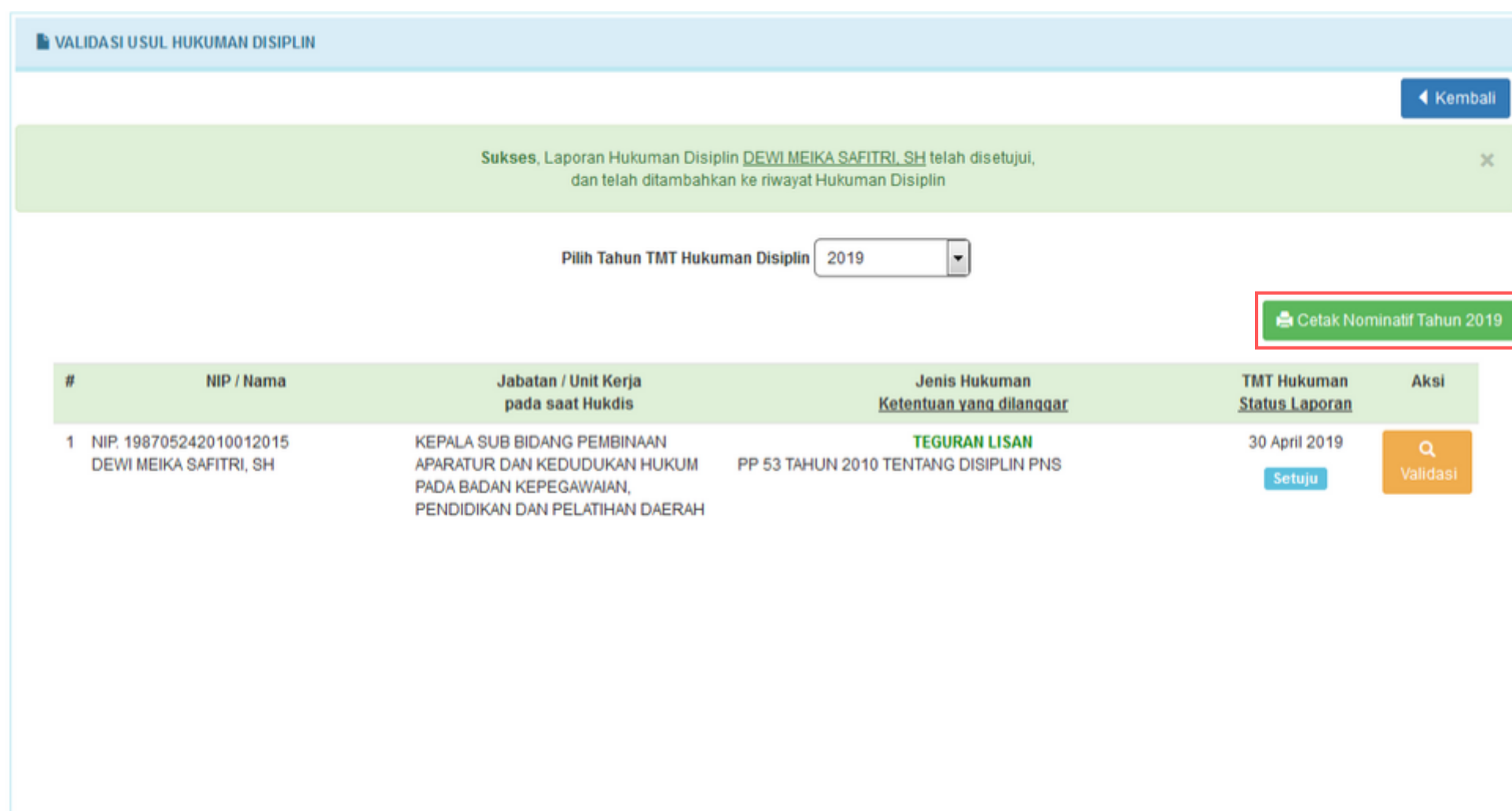
CPNS PNS | Diklat | Jabatan | Pangkat | Pendidikan | Keluarga | Penghargaan | SKP | KGB | Cuti | **Hukdis**

Untuk melihat riwayat hukuman disiplin, masuk pada halaman profil pegawai terdapat menu (HUKDIS)

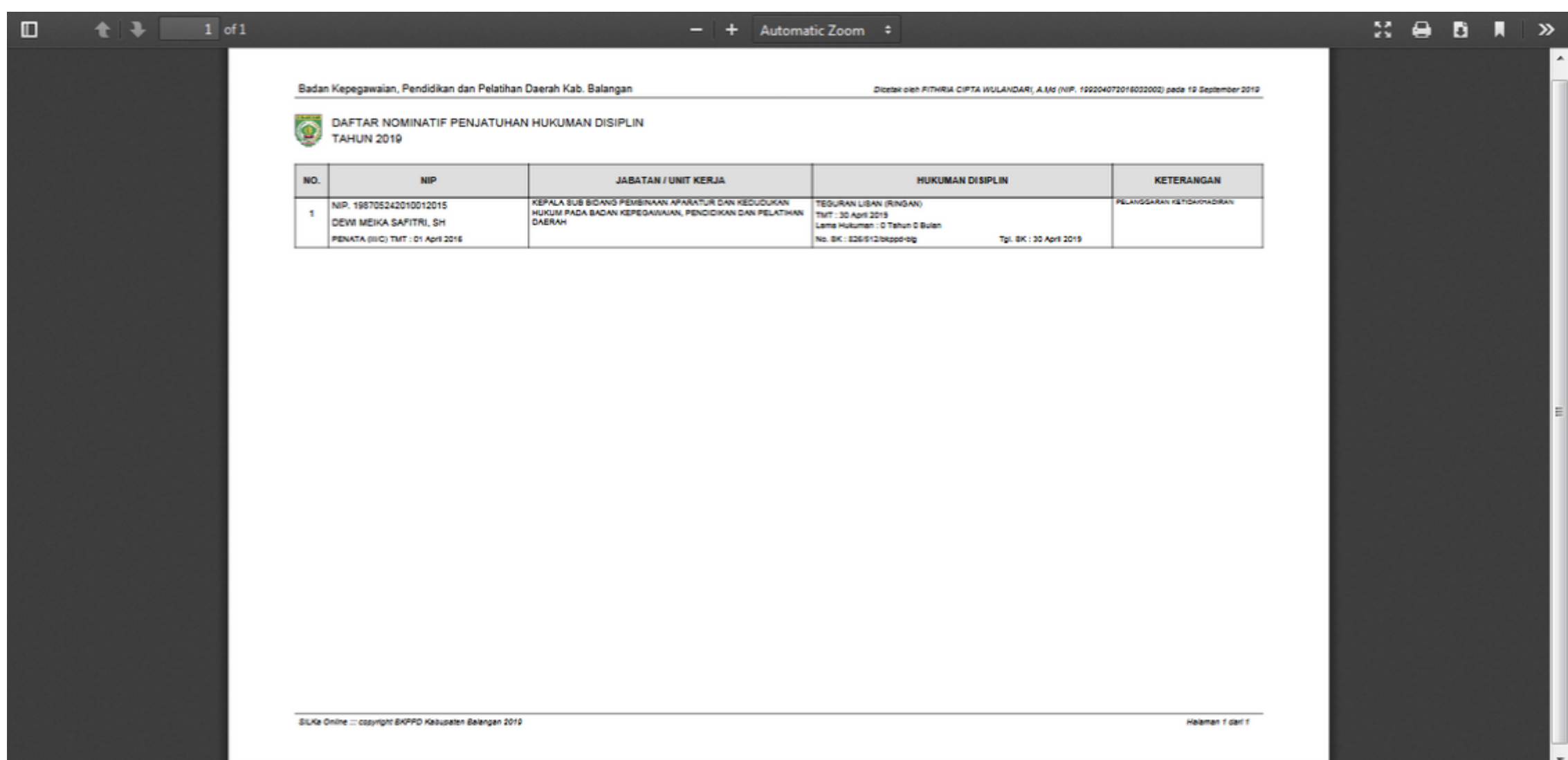
RIWAYAT HUKUMAN DISIPLIN
DEWI MEIKA SAFITRI, SH :: 198705242010012015
Penambahan dan Update Riwayat Hukuman Disiplin hanya dapat dilakukan melalui Layanan SIADIS

#	Jenis Hukuman	TMT Hukuman	Lama Hukuman	Surat Keputusan	Aksi
1	TEGURAN LISAN PELANGGARAN KETIDAKHADIRAN	30 April 2019	0 Tahun 0 Bulan	KEPALA No. SK. 826/512/bkppd-blg Tgl. SK. 30 April 2019 File SK tidak tersedia, silahkan upload !!!	Hapus Browse... No file selected. Upload

Contoh di atas terdapat riwayat hukuman disiplin A.n DEWI MEIKA SAFITRI, SH. Selanjutnya User melakukan upload file SK Disiplin dengan ukuran file maksimal 500kb format PDF. Apabila file akan dirubah, tinggal upload ulang file yang baru, sistem akan otomatis mereplace file sebelumnya



Kembali ke halaman laporan hukuman disiplin, terdapat tombol Cetak Nominatif Tahun Sekarang Pengelola Kepegawaian dapat mencetak nominatif yang terkena hukuman disiplin pada tahun tersebut



Gambar diatas contoh dari Nominatif Hukuman Disiplin.

The background features several decorative elements: a wavy striped pattern in orange and pink at the top left; a wavy striped pattern in pink and orange at the top right; a large, multi-colored abstract shape in shades of purple, pink, and yellow in the center; and a blue-to-green gradient abstract shape at the bottom right. There are also several small solid circles in orange and yellow scattered around the central shape.

Thank you!

Hopefully this manual is useful for users and
brings blessings.